

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat diwujudkan supaya masyarakat dapat hidup dengan layak sehingga mampu mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran (Fadjar, 2020).

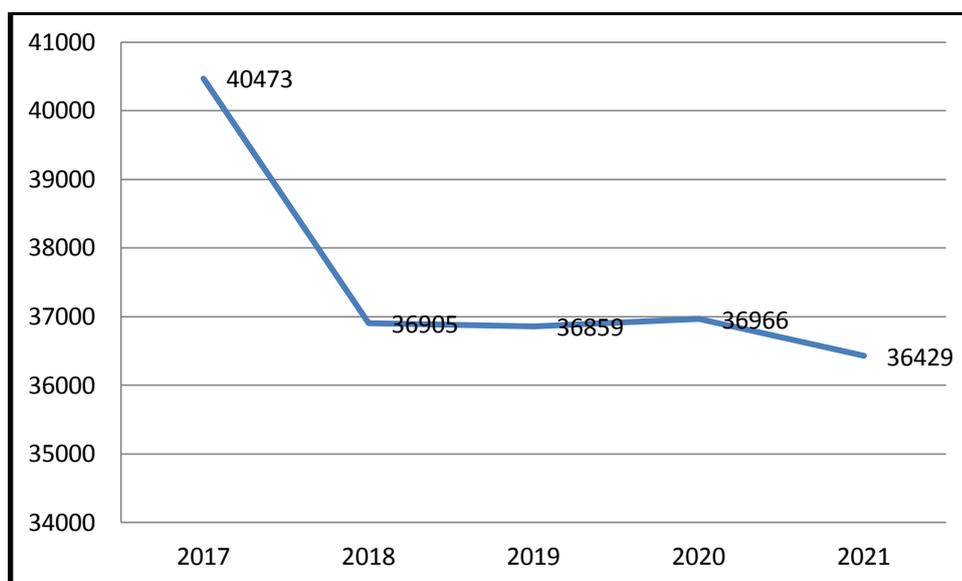
Kesejahteraan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup (BPS, 2020). Sedangkan menurut BKKBN (2015) keluarga sejahtera adalah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. BKKBN membagi criteria keluarga sejahtera dalam tiga tahapan yakni tahan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), dan Keluarga Sejahtera (KS).

Indikator keluarga sejahtera merupakan satu-satunya indikator yang menilai keberhasilan pembangunan dengan unit analisisnya keluarga. Indikator keluarga sejahtera mengidentifikasi keluarga miskin dan tidak miskin. Data tersebut dijadikan sebagai dasar penentu sasaran berbagai program bukan saja yang dilaksanakan oleh pemerintah namun juga berbagai program instansi lainnya. Indikator keluarga sejahtera telah secara luas dipergunakan baik sebagai

tolok ukur dalam kajian evaluasi berbagai program yang mengukur perubahan atau perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat (Pratama, 2017).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo tidak bisa lepas dari masyarakat yang bermukim di pedesaan, oleh karena kantong-kantong kemiskinan banyak terjadi di wilayah pedesaan daripada di wilayah urban maupun suburban. Guna merencanakan upaya sistematis pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya mengungkap pengetahuan dan potensi masyarakat menyangkut pemahaman mereka tentang makna kesejahteraan keluarga.

Keluarga sejahtera Tahap II, yaitu para keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Misalnya secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berperan aktif menjadi pengurus lembaga atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, pendidikan dan lainnya. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, pengembangan serta mampu memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan kepada masyarakat, serta aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan (Kuswardinah, 2016).



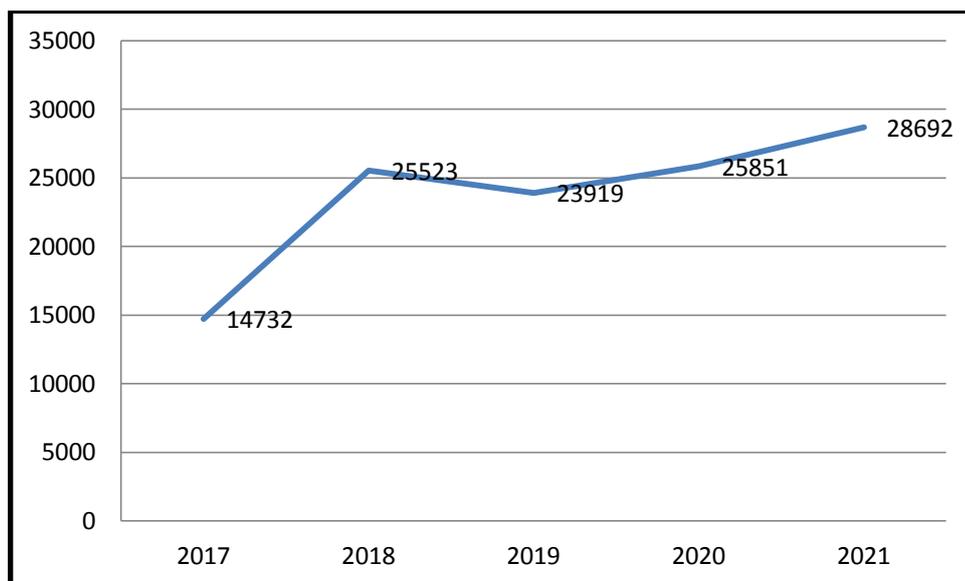
Grafik 1. 1 Perkembangan Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II, III dan III Plus di Kabupaten Sukoharjo Selama Periode 2017-2021 (Jiwa)

Sumber: BPS Sukoharjo

Grafik 1.1 menyajikan perkembangan Jumlah Keluarga Sejahtera tahap II, III dan Plus III di Kabupaten Sukoharjo, terlihat fluktuatif namun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jumlah Keluarga Sejahtera tahap II, III dan III Plus tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 40473 jiwa. Menurun dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018 sebesar 36905 dan tahun 2019 sebesar 36859. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 meningkat sebesar 107 jiwa mejadi 36966 jiwa, dan akhirnya menurun cukup drastis pada tahun 2021 sebear 537 jiwa mejadi 36429 jiwa.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Kemensos (2014) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat melalui bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial

(lansia dan penyandang disabilitas). Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, melalui komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial (Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan) (Cahyono, 2020).



Grafik 1. 2 Perkembangan Penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sukoharjo Selama Periode 2017-2021 (Jiwa)

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

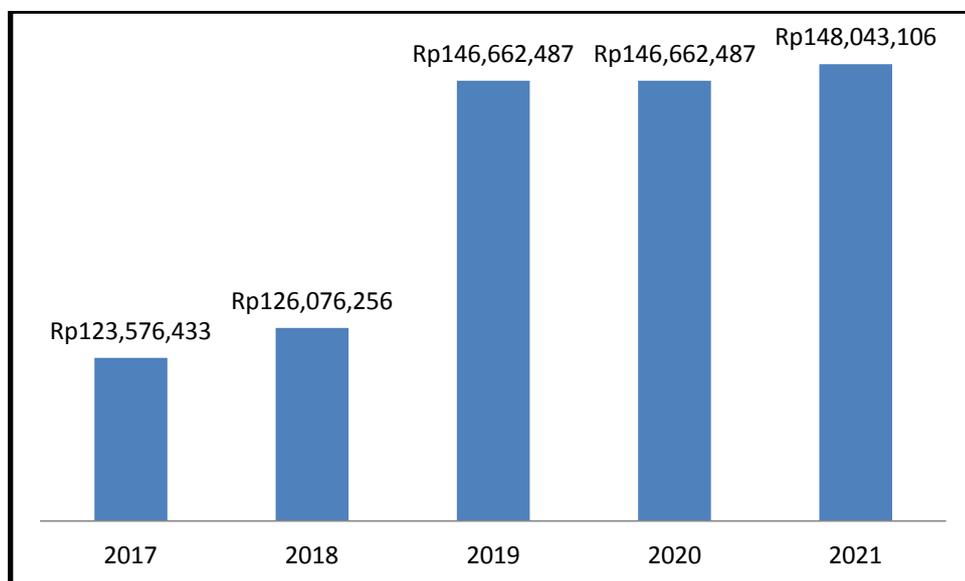
Grafik 1.2 menyajikan perkembangan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sukoharjo bergerak secara fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 28692 jiwa. Sedangkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 14732 jiwa. Tujuan PKH adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam

mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam rangka pembangunan desa yang menyeluruh, terpadu dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yang tepat.

Pemerintah Joko Widodo memberikan tambahan dana dalam rangka pembangunan desa melalui Dana Desa untuk memberikan suntikan dana kepada desa dalam melakukan percepatan pembangunan. Dana Desa itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (8) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Demi terwujudnya efektivitas penggunaan dana desa maka pemerintah melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014 mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2015, yakni Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2015 terbagi dalam dua hal, yakni desa. Pada tahun berikutnya pemerintah kembali mengeluarkan peraturan mengenai prioritas dana desa yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2016.



Grafik 1. 3 Perkembangan Total Dana Desa Kabupaten Sukoharjo T.A. 2017-2021 (ribu rupiah)

Sumber: JDIH Kab. Sukoharjo, diolah

Grafik 1.3 menggambarkan total dana desa di Kabupaten Sukoharjo meningkat terus menerus selama periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 total dana desa sebesar Rp 123,4 miliar meningkat di tahun

2018 sebesar Rp 249,6 miliar menjadi Rp 126,1 miliar dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi Rp 146,7 miliar. Lonjakan yang cukup tajam dalam periode 2018 menuju periode 2019 disebabkan karena untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, di sisi lain kualitas dan kuantitas pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa cukup baik pada tahun lalu. Pada tahun 2020 anggaran dana desa masih sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 146,7 miliar. Untuk tahun 2020, dana desa difokuskan dalam menyikapi pandemi Covid-19 melalui *refocusing* penggunaan dana desa yang meliputi 3 fokus utama yaitu, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pada tahun 2021 dana desa meningkat lagi menjadi Rp 148,0 miliar (JDIH, 2020).

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel pada 11 kecamatan yang diamati selama kurun waktu 5 tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, luas wilayah dan penggunaan lahan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, luas wilayah dan penggunaan lahan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terusnya hasil riset tentang hubungan antara PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, luas wilayah dan penggunaan lahan terhadap tingkat kesejahteraan di mana hasil tersebut berguna bagi Pemerintah Daerah untuk efektivitas program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel pada 11 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dalam rentang waktu 5 tahun sehingga model ekonometrika dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$$KS_{it} = \beta_0 + \beta_1(DD)_{it} + \beta_2(PKH)_{it} + \beta_3(LWP)_{it} + \beta_4(PL)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

<i>KS</i>	= Keluarga Sejahtera Tahap II, III dan III Plus (Jiwa)
<i>DD</i>	= Dana Desa (ribu rupiah)
<i>PKH</i>	= Program Keluarga Harapan (Jiwa)
<i>LWP</i>	= Luas Wilayah Pertanian (Ha)
<i>PL</i>	= Penggunaan Lahan (Ha)
<i>i</i>	= Kabupaten/Kota ke-I (<i>cross section</i>)
<i>t</i>	= Tahun (<i>time series</i>)
β_0	= Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi
 ε = *Error Term* (faktor kesalahan)

E.2. Data dan Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Keluarga Sejahtera Tahap II, III dan III Plus, Dana Desa, PKH, Luas Wilayah Pertanian dan Penggunaan lahan tahun 2017-2021. Data tersebut diperoleh dari Sistem Informasi Desa (Kemendes), BPS, Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, dan JDIH Kabupaten Sukoharjo.

F. Sistem Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori kesejahteraan masyarakat, dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi daerah penelitian sebaran kategori tingkat kesejahteraan masyarakat, dana desa, program keluarga harapan, luas wilayah dan

penggunaan lahan di masing-masing Kecamatan di Sukoharjo, analisis data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN